



Kompleksitas Transformasi Konflik Pasca Kudeta di Guinea 2021-2024

Tia Fatihah Handayani¹, Syaima², Peni Hanggarini³

¹Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, tiafatihahhandayani@gmail.com

²Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, syaimaahaddad11@gmail.com

³Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, peni.hanggarini@paramadina.ac.id

Corresponding Author: tiafatihahhandayani@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the conflict in Guinea following the 2021 military coup, with a focus on efforts to build Positive Peace through effective conflict management. The research explores the underlying factors that triggered social and political tensions after the coup and evaluates the strategies implemented by the government and civil society organizations in fostering sustainable peace. A qualitative approach was employed, utilizing document analysis to gain in-depth insights into the perspectives of various stakeholders involved in the conflict dynamics and peacebuilding processes. The findings reveal that the success of conflict management in Guinea heavily depends on the active participation of all segments of society, including local communities, in decision-making processes. Nevertheless, significant challenges persist, such as social inequality, widespread corruption, and a deep mistrust in governmental institutions, all of which hinder efforts to achieve lasting peace. The study recommends enhancing public participation in policy formulation, strengthening institutional capacities, and promoting government transparency as essential steps toward achieving Positive Peace. These findings contribute to a deeper understanding of the conflict dynamics in Guinea and underscore the importance of adopting a holistic approach in building long-term stability and reconciliation.

Keyword: Positive Peace, Conflict, Conflict Management, Guinea

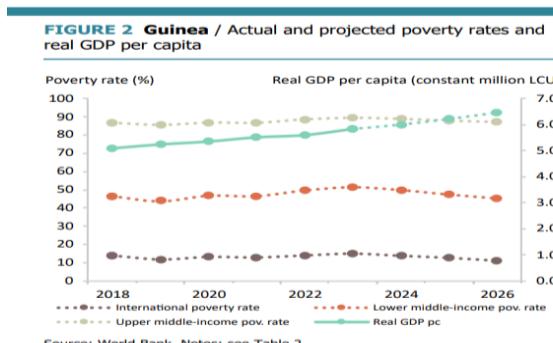
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik yang terjadi di Guinea pasca kudeta militer tahun 2021, dengan fokus pada upaya membangun *Positive Peace* melalui manajemen konflik yang efektif. Studi ini mengeksplorasi berbagai faktor pemicu ketegangan sosial dan politik yang muncul pasca kudeta serta mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam perspektif para pemangku kepentingan terkait dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen konflik di Guinea sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tantangan seperti ketimpangan sosial, tingginya tingkat korupsi, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah masih menjadi hambatan besar dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta transparansi dalam pemerintahan sebagai langkah penting menuju *Positive Peace*. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dinamika konflik di Guinea dan menggarisbawahi urgensi pendekatan holistik dalam menciptakan stabilitas dan rekonsiliasi jangka panjang.

Kata Kunci: *Positive Peace, Konflik, Manajemen Konflik, Guinea*

PENDAHULUAN

Guinea merupakan sebuah negara di Afrika Barat, memiliki sejarah panjang yang penuh dengan konflik politik dan kudeta militer. Sejak meraih kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1958, Guinea mengalami berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari otoriter hingga transisi demokrasi (Humphreys & Mohamed, 2005). Kudeta terbaru pada 5 September 2021 menggulingkan Presiden Alpha Condé, menandai puncak ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap korup dan otoriter. Meskipun Condé terpilih secara demokratis pada tahun 2010, pemerintahannya gagal memenuhi harapan rakyat akan perbaikan sosial dan ekonomi, yang memicu protes besar-besaran. Konflik ini dipicu oleh ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil. Meskipun kaya akan mineral seperti bauksit dan emas, sebagian besar penduduk Guinea masih hidup dalam kemiskinan.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Guinea

Tingkat kemiskinan di Guinea merupakan isu signifikan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 30% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun diperkirakan menurun menjadi 28% pada tahun 2022, proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan angka meningkat kembali menjadi 32%. Untuk tahun 2024, diperkirakan tingkat kemiskinan akan tetap tinggi di kisaran 31% akibat ketidakstabilan politik dan krisis global. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi (World Bank, 2021).

Pemerintahan Condé berusaha untuk mengubah konstitusi agar dapat menjabat lebih dari dua kali, yang memicu gelombang protes dan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Kudeta militer yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya ini merupakan respons terhadap situasi politik yang semakin tidak stabil dan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Kudeta militer yang dipimpin Kolonel Mamady Doumbouya merupakan respons terhadap ketidakpuasan publik. Masyarakat Guinea, yang telah melalui banyak pergesekan, menantikan perubahan nyata dan

berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana manajemen konflik dapat berkontribusi pada pencapaian perdamaian positif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi manajemen konflik yang efektif pasca-kudeta, dengan fokus pada aktor-aktor kunci dalam proses negosiasi dan langkah-langkah untuk mengelola ketegangan sosial.

Strategi yang inklusif, melibatkan dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta keterlibatan aktor internasional, sangat penting. Penelitian ini juga akan menganalisis peran media dalam membangun narasi positif dan pentingnya pendidikan dalam membangun perdamaian jangka panjang. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan Guinea dapat mencapai stabilitas dan menghindari siklus kekerasan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pembangunan perdamaian di Guinea serta menjadi referensi bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Membangun pondasi yang kuat untuk perdamaian positif sangat penting agar semua warga Guinea dapat hidup dalam kesejahteraan dan harmoni.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis konflik yang terjadi di Guinea pasca-kudeta, dengan fokus khusus pada upaya membangun perdamaian positif melalui manajemen konflik yang efektif antara tahun 2021 hingga 2024. Pendekatan ini dipilih karena memberikan peneliti kemampuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi situasi di Guinea setelah peristiwa kudeta. Dengan memahami konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam proses perdamaian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen resmi, laporan organisasi internasional, artikel media, dan studi literatur yang relevan. Dokumen resmi dan laporan memberikan wawasan kritis mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga internasional, serta efektivitasnya dalam merespons kebutuhan masyarakat. Artikel media berfungsi sebagai cermin persepsi publik dan menggambarkan situasi terkini di lapangan, sementara studi literatur menyediakan kerangka teoritis dan konteks historis yang esensial untuk memahami akar penyebab konflik dan potensi solusi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis konten. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen seperti kebijakan pemerintah, laporan hak asasi manusia, dan data ekonomi. Melalui analisis konten, peneliti mengidentifikasi narasi, tema, dan pola yang muncul dari data tersebut. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual tetapi juga untuk memahami bagaimana narasi-narasi tersebut membentuk persepsi publik tentang perdamaian dan konflik di Guinea.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini mencakup pengkodingan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari dokumen serta hasil analisis konten. Dengan cara ini, peneliti dapat menyusun narasi yang menggambarkan situasi pasca-kudeta di Guinea beserta tantangan dalam membangun perdamaian positif. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Pendekatan analitis ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini tetapi juga memberikan wawasan tentang langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai manajemen konflik yang efektif dan perdamaian berkelanjutan di Guinea.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Pasca-Kudeta

Kudeta militer yang terjadi di Guinea pada 5 September 2021 merupakan manifestasi dari ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Alpha Conde. Sejak

terpilih pada tahun 2010, Condé menghadapi kritik tajam terkait korupsi yang merajalela dan ketidakmampuannya dalam menangani masalah kemiskinan yang meluas di negara yang kaya akan sumber daya alam ini. Masyarakat Guinea, yang sebagian besar hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, mulai menunjukkan frustrasi mereka melalui protes besar-besaran, yang sering kali berujung pada kekerasan dan bentrokan dengan aparat keamanan. Sebelum kudeta, sekitar 30 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut, mencerminkan tingginya tensi sosial dan keinginan rakyat untuk perubahan yang nyata dan keadilan sosial (Schultes, 2022).

Setelah kudeta yang terjadi pada 5 September 2021, junta militer yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya berupaya menciptakan stabilitas di Guinea. Meskipun ada janji untuk membentuk pemerintahan transisi yang inklusif dan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, insiden kekerasan tetap terjadi, menunjukkan bahwa tantangan besar masih ada. Salah satu peristiwa paling tragis pasca kudeta adalah bentrok antar suporter sepak bola pada Desember 2024, yang dilansir pada halaman CNBC Indonesia bahwa terjadi kerusuhan dengan jumlah korban sekitar 100 orang (CNBC Indonesia, 2024). Kondisi politik di negara ini sudah lama ditandai oleh ketegangan dan pembatasan. Mantan Presiden Guinea, Alpha Condé, juga mengkritik insiden ini, menyoroti bahaya dari organisasi yang tidak bertanggung jawab dalam konteks ketidakstabilan yang ada. Tragedi stadion bukanlah hal baru di Guinea; pada tahun 2009, lebih dari 150 orang tewas dalam kerusuhan di stadion di ibu kota, Conakry, saat protes terhadap rencana mantan diktator Dadis Camara.

Situasi politik di Guinea semakin rumit setelah kudeta yang menggulingkan Condé pada tahun 2021, yang terjadi setelah kemenangan kontroversialnya dalam pemilihan presiden. Pemimpin militer saat ini, Mamady Doumbouya, yang diduga berambisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang, telah membubarkan 53 partai politik. Tindakan-tindakan ini mencerminkan ketidakstabilan yang mendalam dan tantangan yang dihadapi Guinea dalam membangun kembali struktur politik yang stabil (International Crisis Group, 2022). Setelah kudeta, Guinea menghadapi periode yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang kompleks. Krisis yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh dampak langsung kudeta militer, namun juga oleh masalah mendasar seperti ketidakadilan sosial dan korupsi yang telah lama ada. Oleh karena itu, membangun kepercayaan masyarakat menjadi sangat penting.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi fokus utama. Partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal, diperlukan untuk mencapai perdamaian yang langgeng. Dialog yang melibatkan semua pihak dapat menjembatani perbedaan perspektif, memberikan kesempatan bagi setiap suara untuk didengar, mengurangi ketegangan, dan membangun legitimasi dalam proses rekonsiliasi. Langkah penting lainnya adalah reformasi struktural dalam kebijakan pemerintah untuk mewujudkan sistem yang lebih responsif dan inklusif. Upaya mengatasi akar masalah konflik, bukan hanya gejala-gejalanya, menjadi kunci untuk mencapai keadilan sosial. Dukungan internasional dan mediasi pihak ketiga memainkan peran penting dalam memberikan legitimasi dan memperkuat upaya perdamaian melalui solusi yang mungkin belum terpikirkan oleh pihak-pihak yang bertikai.

Selain itu, Guinea juga menghadapi masalah ekonomi yang signifikan, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakpuasan sosial, yang berpotensi memicu kekerasan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan upaya pengelolaan konflik untuk menciptakan kondisi yang stabil dan damai. Pendidikan dan peningkatan kesadaran sosial juga berperan krusial dalam mencegah kekerasan di masa depan, serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia di masyarakat. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai tantangan ini, harapan untuk membangun masa depan Guinea yang lebih baik semakin meningkat. Komitmen dari semua pihak dan pendekatan inklusif akan membuka jalan menuju perdamaian yang stabil dan berkelanjutan. Dalam proses rekonsiliasi, penting untuk diingat bahwa setiap suara, pengalaman, dan perspektif memiliki kontribusi dalam menciptakan harmoni bagi seluruh masyarakat di Guinea. Masyarakat internasional perlu memantau situasi dan

mendukung transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Ketegangan sosial tetap ada, meskipun pemerintah baru berusaha mengatasi ketidakpuasan. Kematian dalam insiden kekerasan menunjukkan bahwa konflik dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk olahraga. Walaupun Kolonel Mamady Doumbouya berkomitmen untuk reformasi dan tidak menangkap pejabat sebelumnya, upaya ini sering kali tidak cukup untuk meredakan ketegangan yang telah lama terakumulasi. Insiden ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam manajemen konflik dan pembangunan perdamaian untuk mencapai stabilitas jangka panjang.

Tanggapan internasional terhadap kudeta di Guinea pada 5 September 2021 sangat signifikan dan mencerminkan keprihatinan global terhadap stabilitas politik di negara tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, secara tegas mengutuk pengambilalihan kekuasaan dengan kekuatan senjata dan menyerukan pembebasan Presiden Alpha Condé. Dalam pernyataannya, Guterres menekankan pentingnya pemulihian tatanan konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Tanggapan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional sangat memperhatikan situasi di Guinea, mengingat implikasi yang lebih luas terhadap keamanan regional di Afrika Barat. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) juga memberikan response yang tegas. Melalui pernyataan resmi, ECOWAS mengancam akan memberlakukan sanksi jika tatanan konstitusi tidak segera dipulihkan. Pemimpin Ghana, Nana Akufo-Addo, yang juga menjabat sebagai penjabat presiden ECOWAS, menegaskan bahwa setiap perubahan politik yang tidak konstitusional tidak dapat diterima dan harus segera dibatalkan. Tindakan ini menunjukkan komitmen ECOWAS untuk menjaga stabilitas di kawasan dan mendorong kembalinya pemerintahan yang demokratis (United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS), 2021).

Berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Meksiko, secara tegas mengecam kudeta di Guinea dan menyerukan pembebasan Alpha Condé. Mereka menekankan bahwa tindakan kekerasan dan pengambilalihan kekuasaan yang tidak konstitusional hanya akan merusak prospek Guinea untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan. Tanggapan internasional ini mencerminkan kesadaran akan tantangan besar yang dihadapi Guinea pasca-kudeta, seperti ketidakstabilan politik dan sosial yang dapat memperburuk kondisi masyarakat. Dukungan global sangat penting dalam mendorong proses transisi menuju pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa situasi politik di Guinea bukan hanya masalah lokal, tetapi juga isu global yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif dari komunitas internasional. Dengan adanya dukungan dan tekanan dari berbagai negara, diharapkan Guinea dapat mengatasi tantangan yang ada dan bergerak menuju stabilitas jangka panjang serta pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 2. Pusat Kudeta di Conakry

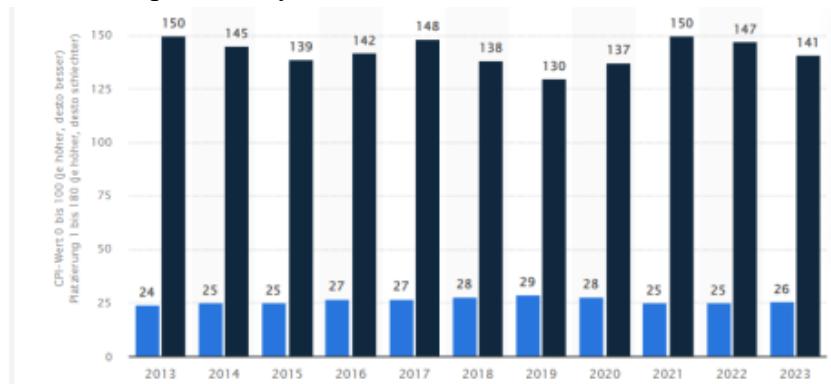
<https://operationworld.org/locations/guinea/>

Tantangan Ekonomi Dan Sosial

Setelah kudeta militer yang terjadi pada September 2021, Guinea menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan ketahanan, indikator sosial tetap tidak memuaskan. Data dari *International Monetary Fund* (IMF) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Guinea rata-rata mencapai 5,1% selama periode 2019-2023. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan perbaikan dalam indikator sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Tingkat kemiskinan di Guinea tetap tinggi, dengan sekitar 30% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021. Meskipun ada sedikit penurunan menjadi 28% pada tahun 2022, proyeksi menunjukkan peningkatan kembali menjadi 32% pada tahun 2023 akibat dampak dari ketidakstabilan politik dan krisis global. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya mobilisasi pendapatan domestik dan pengeluaran sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara sebanding, yang menyebabkan Guinea tertinggal dalam pencapaian pendidikan dan kesehatan (International Monetary Fund, 2024).

Korupsi di Guinea merupakan masalah struktural yang mendalam dan kompleks, yang secara signifikan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut laporan BTI Transformation Index, meskipun Guinea memiliki potensi sumber daya alam yang besar, keuntungan ekonomi sering kali tidak dirasakan oleh masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara ini kaya akan sumber daya, distribusi kekayaan sangat tidak merata, menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Sebagian kecil populasi menikmati kekayaan sementara mayoritas masih bergelut dengan kemiskinan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa korupsi dalam pemerintahan berfungsi sebagai penghalang utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional, Guinea memperoleh skor 17 dari 100 (Transparency International the Global Coalition Against Corruption, 2023). Skor ini mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi di sektor publik dan menunjukkan persepsi masyarakat terhadap korupsi di 180 negara. Tingkat korupsi yang tinggi ini tidak hanya mencerminkan masalah dalam pengelolaan sumber daya tetapi juga menandakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang menyebabkan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan perdamaian positif, penting bagi Guinea untuk mengatasi masalah korupsi secara sistematis dan menyeluruh. Upaya reformasi harus difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 3. Guinea Penilaian Persepsi Korupsi menurut Corruption Perceptions Index (CPI)
Sumber:(de.statista.com, 2024)

Laporan BTI Transformation Index 2024 menegaskan bahwa meskipun Guinea memiliki sumber daya alam yang melimpah, korupsi dalam pemerintahan telah menciptakan kesenjangan signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Grafik Indeks Persepsi Korupsi (CPI) untuk Guinea, yang mencakup periode 2013 hingga 2023, memperlihatkan evolusi dalam pandangan masyarakat terkait isu korupsi di negara tersebut. Data dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa skor CPI Guinea mengalami peningkatan dari 24 pada tahun 2013 menjadi 26 pada tahun 2023. Kendati peningkatan ini tergolong moderat, hal ini mengindikasikan adanya upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah beserta institusi terkait dalam menanggulangi praktik korupatif. Kenaikan skor CPI ini mencerminkan adanya progres dalam tata kelola pemerintahan yang mulai dirasakan dampaknya oleh publik. Implementasi kebijakan yang menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas berpotensi menghasilkan dampak positif, serta menumbuhkan ekspektasi akan peningkatan integritas di lingkungan sektor publik. Lebih lanjut, apresiasi skor ini berpotensi menarik attensi investor mancanegara, yang semakin yakin bahwa Guinea dapat menjadi arena bisnis yang lebih bersih dengan risiko korupsi yang minimal. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa posisi Guinea masih berada pada peringkat 141 dari 180 negara yang dinilai. Hal ini menegaskan bahwa tantangan signifikan dalam penanganan korupsi masih mengemuka. Penilaian ini berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun telah terjadi kemajuan, langkah-langkah yang lebih substansial dan berkelanjutan tetap diperlukan guna mencapai tingkat integritas yang lebih optimal. Peningkatan skor CPI tidak mengaburkan realitas bahwa Guinea tetap menghadapi sejumlah kendala serius, termasuk instabilitas politik dan permasalahan sosial lainnya.

Masyarakat secara berkelanjutan merasakan implikasi dari praktik korupsi yang meresap ke berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, komitmen yang lebih kuat diperlukan untuk mengimplementasikan reformasi yang efektif serta komprehensif. Secara keseluruhan, representasi visual Indeks Persepsi Korupsi Guinea mengisyaratkan bahwa, meskipun terdapat perkembangan positif berupa kenaikan skor CPI, tantangan yang ada tetap memerlukan perhatian yang saksama. Hal ini mempertegas urgensi strategi yang berkelanjutan dan holistik dalam membangun kepercayaan publik, serta mewujudkan kondisi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Guinea. Sebagian kecil populasi menikmati kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam, sementara mayoritas masih bergelut dengan kemiskinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi yang dihasilkan tidak merata dan tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, laporan dari World Bank pada tahun 2021 mencatat bahwa korupsi merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial Guinea. Selain mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, korupsi juga mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan di negara tersebut (World Bank, 2021).

Selanjutnya Laporan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2022 mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Guinea terkait dengan korupsi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di sektor publik. Rekomendasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta untuk mengatasi dampak negatif dari korupsi terhadap masyarakat (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2022). Ketidakstabilan sosial juga meningkat pasca-kudeta. Warga Guinea mengalami kesulitan akibat lonjakan biaya hidup, pemadaman listrik yang meluas, dan dampak dari ledakan fasilitas penyimpanan bahan bakar pada Desember 2023 yang menyebabkan kekurangan bahan bakar. Ketegangan ini berpotensi memicu kerusuhan sosial jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut. Laporan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan bahwa ketidakpuasan masyarakat dapat memicu protes dan kerusuhan lebih lanjut jika transisi menuju pemerintahan sipil tidak dilakukan secara inklusif (Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2024).

Manajemen Konflik Dan Pembangunan Perdamaian Transformasi Konflik

Transformasi konflik di Guinea adalah proses yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan pendekatan analitis untuk mencapai perdamaian berkelanjutan. Dalam konteks ini, dialog inklusif dan rekonsiliasi antara kelompok-kelompok yang terlibat menjadi sangat penting. John Paul Lederach berpendapat bahwa transformasi konflik tidak hanya berfokus pada penyelesaian perselisihan, tetapi juga pada pengidentifikasi dan penanganan akar penyebabnya, seperti ketidakadilan sosial, ekonomi, dan ketidakpuasan politik. Dialog inklusif berfungsi sebagai platform bagi semua pihak untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka, yang esensial dalam membangun kembali kepercayaan yang hilang. Proses ini tidak hanya mengurangi ketegangan tetapi juga menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih baik antar kelompok. Rekonsiliasi, di sisi lain, memainkan peran krusial dengan mengakui kesalahan masa lalu dan membangun hubungan yang lebih konstruktif di masa depan. Lederach juga menekankan perlunya mengatasi ketidakadilan struktural melalui reformasi kebijakan dan distribusi sumber daya yang adil, sehingga semua kelompok merasa memiliki akses yang setara.

Lebih jauh lagi, perubahan relasional dan kultural juga sangat penting dalam proses transformasi ini. Membangun hubungan saling menghormati dan mengedukasi masyarakat tentang keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian. Dengan komitmen semua pihak terhadap dialog konstruktif, Guinea tidak hanya dapat menyelesaikan konflik yang ada tetapi juga mencegah munculnya konflik serupa di masa depan. Referensi utama untuk pendekatan ini dapat ditemukan dalam karya Lederach, *"Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies"* (1997), yang menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dan perubahan di berbagai level untuk mencapai perdamaian sejati. Dengan demikian, analisis terhadap transformasi konflik di Guinea menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan bergantung pada kemampuan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam dialog yang inklusif serta komitmen untuk melakukan reformasi struktural yang diperlukan.

Strategi Manajemen Konflik yang Efektif

Dalam konteks manajemen konflik yang efektif, penerapan strategi yang tepat menjadi faktor krusial dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Di Guinea, yang telah menghadapi konflik berkepanjangan selama beberapa dekade, pendekatan yang terstruktur dan inklusif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Analisis terhadap proses manajemen konflik menunjukkan bahwa salah satu komponen utama dari strategi tersebut adalah dialog terbuka. Melalui dialog, semua pihak yang terlibat dalam konflik dapat saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing, menciptakan ruang untuk solusi kolaboratif. Dialog terbuka tidak hanya berfungsi untuk meredakan ketegangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik. Dengan demikian bahwa mediasi oleh pihak ketiga juga merupakan elemen penting dalam manajemen konflik. Pihak ketiga, seperti organisasi internasional atau lembaga non-pemerintah, dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu menjembatani perbedaan. Dengan menawarkan solusi yang mungkin belum dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat, mediasi ini memberikan legitimasi pada proses penyelesaian dan mendorong semua pihak untuk menerima hasilnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga tidak hanya mempercepat proses penyelesaian konflik tetapi juga meningkatkan kemungkinan keberlanjutan hasil yang dicapai.

Keterlibatan masyarakat sipil harus menjadi bagian integral dari strategi manajemen konflik. Masyarakat lokal, termasuk pemimpin komunitas dan organisasi masyarakat, perlu dilibatkan dalam setiap tahap proses. Dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam dialog dan pengambilan keputusan, proses rekonsiliasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

proses perdamaian tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, manajemen konflik yang efektif di Guinea memerlukan kombinasi dari dialog terbuka, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, diharapkan dapat tercipta kondisi damai yang berkelanjutan dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Pendekatan analisis ini menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam menciptakan perdamaian positif di Guinea. Melalui pemahaman mendalam tentang dinamika konflik dan penerapan strategi manajemen yang tepat, Guinea dapat bergerak menuju pemulihan dan stabilitas jangka panjang.

Dampak Kebijakan Terhadap Positive Peace

Guinea pasca perjanjian damai memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian positive peace, yang merupakan konsep yang diperkenalkan oleh (Galtung, 2018). *Positive peace* tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan partisipasi politik yang inklusif. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Guinea adalah reformasi politik. Dengan memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, pemerintah berusaha mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok etnis dan politik. Langkah ini sejalan dengan gagasan Galtung tentang mengatasi kekerasan struktural, yang sering menjadi akar penyebab konflik. Dengan menciptakan ruang bagi semua kelompok untuk terlibat dalam proses politik, ketegangan sosial dapat diminimalisir, dan potensi konflik dapat dikurangi.

Pembangunan ekonomi di Guinea telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah, dengan fokus pada investasi infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, teori (Galtung, 2018) mengenai pencegahan konflik sangat relevan. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi adalah kunci dalam mencegah ketidakpuasan sosial yang sering kali memicu kekerasan. Dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya, kebijakan ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih luas di Guinea. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada investasi fisik, tetapi juga pada penciptaan struktur sosial yang inklusif. Mekanisme mediasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum berkembang menjadi konflik terbuka mencerminkan prinsip Galtung tentang pentingnya pengelolaan konflik yang konstruktif. Ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik yang ada, tetapi juga proaktif dalam pencegahan konflik di masa depan.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses ini menjadi krusial. Masyarakat lokal perlu diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga proses rekonsiliasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perdamaian tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak. Secara keseluruhan, kebijakan yang berfokus pada perdamaian positif di Guinea memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas perdamaian jangka panjang. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan secara konsisten, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta dukungan internasional dari organisasi seperti ECOWAS dan PBB. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, Guinea dapat menciptakan kondisi yang lebih damai dan stabil. Pendekatan analisis ini menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan ekonomi dan manajemen konflik sebagai fondasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kudeta yang terjadi di Guinea mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam merespons ketidakpuasan masyarakat secara efektif. Situasi ini menunjukkan bahwa proses

perdamaian yang berkelanjutan sangat diperlukan, dengan melibatkan partisipasi inklusif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, serta seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan antar kelompok. Kepercayaan tersebut harus dibangun secara hati-hati dan bertahap guna memperkuat legitimasi serta efektivitas proses perdamaian.

Dengan komitmen yang konsisten dan pendekatan yang menyeluruh, Guinea memiliki peluang untuk mencapai perdamaian yang stabil dan berkelanjutan yakni perdamaian yang tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga memperbaiki struktur sosial yang menjadi akar permasalahan. Oleh karena itu, masa depan perdamaian di Guinea sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan dalam proses transformasi sosial dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam pengembangan kebijakan serta praktik manajemen konflik yang lebih efektif di masa mendatang.

REFERENSI

- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2024). *Guinea: The Causes and Consequences of West Africa's Latest Coup*.
- CNBC Indonesia. (2024). *Horor! Kerusuhan Maut Suporter Sepak Bola Telan 56 Korban Jiwa*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250507185736-8-631875/video-hgu-dan-hgb-jatuh-tempo-bakal-dikembalikan-ke-negara>
- de.statista.com. (2024). *Korruption in Guinea nach dem CPI bis 2024*. Statista. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/594721/umfrage/wahrgenommene-korruption-in-guinea/>
- Galtung, J. (2018). Violence, peace and peace research. *Organicom*, 15(28), 33–56.
- Humphreys, M., & Mohamed, H. A. (2005). Senegal and Mali. In Understanding Civil War: Evidence and Analysis (Vol. 1-Africa), eds. *Paul Collier and Nicholas Sambanis*. Washington, DC: World Bank, 247–302.
- International Crisis Group. (2022). *Guinea: The Challenges of Transition*. International Crisis Group.
- International Monetary Fund. (2024). *Guinea: 2024 Article IV Consultation and Request for Disbursement*.
- Schultes, I. (2022). Western Africa's recent coups highlight the risk of trading off development for security, the rule of law, and rights. *mo. ibrahim. foundation*, April, 2, 2022–04.
- Transparency International the Global Coalition Against Corruption. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2023*.
- United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS). (2021). *Report on the Political Situation in Guinea*. United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Corruption in Guinea: Challenges and Solutions*.
- World Bank. (2021). *Guinea: Macro Poverty Outlook*.